



PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PENYULUH PERTANIAN DAN
PERIKANAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen, maka untuk kelancaran dan terbantunya tugas-tugas Dinas Pertanian Kabupaten Bireuen dalam pemberian pelayanan kepada petani dan nelayan, perlu dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Penyuluh Pertanian dan Perikanan pada Dinas Pertanian Kabupaten Bireuen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 107)
6. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen (Berita Daerah Bireuen Tahun 2016 Nomor 305);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PENYULUH PERTANIAN DAN PERIKANAN PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BIREUEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen.
6. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang pelayanan, pembinaan petani dan nelayan serta pelaksanaan program peningkatan ketahanan pangan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bireuen.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertanian Kabupaten Bireuen sebagai unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan di lapangan pada setiap Kecamatan dalam Kabupaten Bireuen.

9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Penyuluh Pertanian dan Perikanan yang selanjutnya disingkat UPTD BP3 adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertanian Kabupaten Bireuen yang menyelenggarakan pendataan, penyuluhan, pelayanan, pembinaan kepada petani dan nelayan serta pelaksanaan program peningkatan ketahanan pangan di kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya.
10. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD BP3 pada Dinas Pertanian di setiap Kecamatan dalam Kabupaten Bireuen.
11. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD BP3 pada Dinas Pertanian Kabupaten Bireuen.
12. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD BP3 pada Dinas Pertanian Kabupaten Bireuen.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di UPTD BP3 dilingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Bireuen.
14. Unit Kerja adalah Unit Kerja dilingkungan UPTD BP3 pada Dinas Pertanian Kabupaten Bireuen.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk UPTD BP3 pada Dinas Pertanian, sebagai berikut:

1. UPTD BP3 Kecamatan Samalanga;
2. UPTD BP3 Kecamatan Simpang Mamplam;
3. UPTD BP3 Kecamatan Peulimbang;
4. UPTD BP3 Kecamatan Jeunieb;
5. UPTD BP3 Kecamatan Peudada;
6. UPTD BP3 Kecamatan Pandrah;
7. UPTD BP3 Kecamatan Jeumpa;
8. UPTD BP3 Kecamatan Juli;
9. UPTD BP3 Kecamatan Kota Juang;
10. UPTD BP3 Kecamatan Kuala;
11. UPTD BP3 Kecamatan Peusangan;
12. UPTD BP3 Kecamatan Peusangan Siblah Krueng;
13. UPTD BP3 Kecamatan Peusangan Selatan;
14. UPTD BP3 Kecamatan Jangka;
15. UPTD BP3 Kecamatan Kuta Blang;
16. UPTD BP3 Kecamatan Gandapura; dan
17. UPTD BP3 Kecamatan Makmur.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD BP3, terdiri dari:
 - a. kepala UPTD;
 - b. sub bagian tata usaha; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD BP3 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) UPTD BP3 adalah Perangkat Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD BP3 dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD .

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 5

UPTD BP3 mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau penunjang Dinas di bidang pendataan, penyuluhan, pelayanan, pembinaan petani dan nelayan serta pelaksanaan program peningkatan ketahanan pangan di kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD BP3 menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan teknis administrasi dan teknis operasional kegiatan penyuluhan di wilayah kerjanya;
- b. pelaksanaan pertemuan antara petani dan penyuluh dalam hal melaksanakan penyuluhan dengan mekanisme operasional dan ketentuan yang berlaku;
- c. penyusunan Program Penyuluhan tingkat kecamatan dan diteruskan ke tingkat kabupaten melalui koordinasi dengan Camat dan sepengetahuan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bireuen;
- d. pelaksanaan Program Peningkatan Beras Nasional (P2BN) melalui koordinasi dengan Mantri Tani dan Petugas lainnya yang ada di kecamatan ;
- e. pembinaan, pengendalian dan evaluasi terhadap Penyuluh Lapangan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing;
- f. pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, peralatan/perlengkapan organisasi dan ketatalaksanaan BP3; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kesatu
Kepala UPTD

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan teknis pembinaan terhadap petani/nelayan dan pelaksanaan program peningkatan ketahanan pangan di wilayah kerjanya.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:
- a. pelayanan dan pembinaan Petani/Nelayan serta pelaksanaan program Peningkatan Ketahanan Pangan di Kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya;
 - b. penyiapan kebijakan operasional Penyuluh Lapangan (PL), dan pembinaan kepegawaian pada lingkup BP3 di kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya;
 - c. penyiapan kebijakan umum daerah di bidang pelayanan pembinaan Petani/Nelayan serta pelaksanaan program Peningkatan Ketahanan Pangan di kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya;
 - d. penyiapan kebijakan teknis daerah di bidang pelayanan pembinaan petani/nelayan serta pelaksanaan program peningkatan ketahanan pangan sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama teknis dengan Unit Teknis dan Organisasi lain yang menyangkut bidang pelayanan dan pembinaan serta pelaksanaan program Peningkatan Ketahanan Pangan di kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya;
 - f. Penyelenggaraan monitoring evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pendataan, penyuluhan, pelayanan, pembinaan serta pelaksanaan program Peningkatan Ketahanan Pangan di Kecamatan yang menjadi wilayah kerjanya.
 - g. Pengelolaan tata usaha BP3; dan
 - h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan di bidang pembinaan administrasi.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan perlengkapan dilingkungan UPTD BP3.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja UPTD BP3;
 - b. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;
 - c. pelaksanaan urusan kepegawaian;
 - d. pelaksanaan urusan keuangan;
 - e. pelaksanaan urusan perlengkapan;
 - f. pelaksanaan pengelolaan perpustakaan UPTD BP3;

- g. penyusunan laporan UPTD BP3 secara berkala dan tepat waktu; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas-tugas UPTD BP3 sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan wewenang dari Bupati dengan memperhatikan usul Kepala UPTD melalui Kepala Dinas.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.

Pasal 12

Unsur-unsur lain di lingkungan UPTD BP3 diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan mempertimbangkan usul dari Kepala Dinas.

Pasal 13

Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala UPTD dapat menunjuk pejabat lain untuk mewakilinya dengan memperhatikan Daftar Urut Kepangkatan (DUK).

Pasal 14

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Eselon jabatan pada UPTD BP3 adalah sebagai berikut:

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan pengawas atau eselon IVa; dan
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan pengawas atau eselon IVb.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta berpedoman kepada Peraturan Bupati Bireuen Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas-dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen.

Pasal 17

Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi secara vertikal dan horizontal dengan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 18

Setiap Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.

Pasal 19

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk bagi bawahan.

Pasal 20

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 21

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD BP3 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bireuen Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bireuen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 5 Januari 2017

Plt. BUPATI BIREUEN,

ttd

MUKHTAR

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 6 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ttd

ZULKIFLI

BERITA KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2017 NOMOR 321

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum



M. ZUBAIR, S.H., M.H.
Pembina Tk. I, IV /b
NIP. 19691127 199603 1 006